

Modal Sosial dalam Tata Kelola Wisata Pesisir: Studi di Pantai Delegan Kabupaten Gresik Pasca Pandemi

M. Husni Tamrin¹, Didin Muhafidin², Heru Nurasa³, Entang Adhy Muhtar⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

E-mail Koresponden : husni21002@mail.unpad.ac.id
 d.muhafeidin@unpad.ac.id
 heru.nurasa@unpad.ac.id
 entang@unpad.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the application of coastal area-based social capital in Gresik Regency. Social capital itself has a high role urgency in the context of development, including in the coastal area of Delegan Beach in Gresik Regency. The study of social capital has become a kind of standard with regard to making the community the main subject in the management of the coastal area of Delegan Beach. This study understands the extent of the application of community social capital and its implications in the coastal area of Gresik Regency through a qualitative approach and case studies on the aspect of using Delegan Beach for local life. The concept of social capital becomes the main reference in analyzing the findings in the field. The findings in this study are in the form of a well-organized pattern of community organization in the research area, a strong pattern of building trust and norms that apply between coastal communities, to the development of networks that are able to increase efficiency by facilitating coordinated actions in the dynamics of developing the coastal area of Delegan Beach towards coastal tourist destinations. The dominant groups that appear as subjects are the tourism-aware group (pokdarwis) around the coastal area of Delegan Beach and the Village-Owned Enterprises (BUMDes). However, there are still limited access (funding, licensing, coastal tourism development, and so on) in regional development which is the main problem that hinders the sustainability of local development in the community. The implication of this is that a touch from the government and related agencies such as the Department of Fisheries and Marine Affairs and the Tourism Office of the Gresik Regency Government is needed in an effort to continue development and support for the community around the coastal development of Delegan Beach in Gresik Regency.

Keywords: *Social Capital, Delegan Beach, Gresik Regency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan modal sosial berbasis kawasan pesisir di Kabupaten Gresik. Modal sosial sendiri memiliki urgensi peran yang tinggi pada konteks pembangunan, termasuk di kawasan pesisir Pantai Delegan di Kabupaten Gresik. Studi seputar modal sosial menjadi semacam pakem berkenaan dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek utama dalam pengelolaan kawasan pesisir Pantai Delegan. Studi ini memahami sejauh mana penerapan modal sosial masyarakat beserta implikasinya di wilayah pesisir Kabupaten Gresik melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus pada aspek pemanfaatan Pantai Delegan untuk kehidupan lokal. Konsepsi modal sosial menjadi referensi utama dalam menganalisis temuan di lapangan. Temuan dalam studi ini berupa pola pengorganisasian masyarakat di wilayah penelitian yang terorganisir dengan baik, kuatnya pola pembangunan kepercayaan dan norma yang berlaku antar masyarakat pesisir, hingga pembangunan jejaring yang mampu meningkatkan efisiensi dengan adanya fasilitasi tindakan terkoordinasi dalam dinamika pembangunan kawasan pesisir Pantai Delegan menuju kawasan wisata bahari. Kelompok dominan yang tampil sebagai subjek yakni kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang berada di sekitar kawasan pesisir Pantai Delegan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun demikian, masih adanya keterbatasan akses (pendanaan, perizinan, pembembangan

wisata pesisir, dan sebagainya) dalam pembangunan kawasan menjadi permasalahan utama yang menghambat keberlanjutan pembangunan lokal di masyarakat. Implikasi dari adanya hal tersebut, maka sangat dibutuhkan sentuhan dari pemerintah dan dinas terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya pengembangan lanjutan dan dukungan bagi masyarakat seputar pembangunan pesisir Pantai Delegan di Kabupaten Gresik.

Kata Kunci: Modal Sosial, Pantai Delegan, Kabupaten Gresik

PENDAHULUAN

Keberhasilan dalam tata kelola wisata salah satunya ditandai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan keberlanjutan aktivitas kepariwisataan. Untuk menuju capaian kesejahteraan dan keberlanjutan tersebut, maka bergantung pada akses terhadap sumber daya kepariwisataan tersebut. Dengan kata lain bahwa *property regimes* atau penguasaan terhadap sumber daya menjadi perhatian penting bagi lingkungan sekitar (Bromley & Cernea, 1989), untuk kemudian mampu mengoptimalkan akses tata kelola sumber daya kepariwisataan. Penguasaan atas sumber daya tersebut juga sejalan dengan adanya hak, kewenangan, hingga tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan akses terhadap sumber daya kepariwisataan.

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Tahun	Wisatawan mancanegara	Wisatawan domestic
2014	2.877	3.170.317
2015	3.436	3.185.625
2016	4.874	3.258.126
2017	9.736	3.537.997
2018	14.625	3.553.920
2019	46.915	4.570.483

di Kabupaten Gresik tahun 2014-2019

Sumber. Dinas Pariwisata Kabupaten Gresik (diakses 2021)

Sector kepariwisataan di Kabupaten Gresik menjadi sektor unggulan yang mana setiap tahunnya menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Sejak tahun 2014 hingga data kepariwisataan terakhir pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan baik domestic maupun mancanegara terus meningkat secara signifikan. Di kawasan destinasi pariwisata daerah (DPD) Gresik Utara, terdapat beberapa wisata unggulan yang dikunjungi antara lain Pantai Delegan dan

Bukit Surowiti di Kecamatan Panceng, Makam Kanjeng Sepuh di Kecamatan Sidayu, Benteng Lodewijk di Kecamatan Bungah, Makam Fatimah binti Maemun di Kecamatan Manyar, dan Sentra Industri Songkok dan Rebana di Kecamatan Bungah. Pantai Delegan sendiri merupakan satu-satunya wisata bahari alam berupa pantai di Wilayah Gresik Utara yang merupakan kawasan strategis pariwisata daerah (RIPKA Kabupaten Gresik, diakses 2021). Di kawasan Pantai Delegan, pengembangan pariwisata telah berkontribusi pada sumbangsih penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi biaya parkir, dan tiket/karcis serta pemasukan tambahan lain dari wisatawan pengunjung. Pantai Delegan juga turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar melalui penerimaan pendapatan masyarakat lokal. Di Kabupaten Gresik sendiri, Pantai Delegan telah berkontribusi pada sebagian sector pariwisata, yang mana kontribusinya jumlah wisatawannya sebanyak 195.896 wisatawan di tahun 2019. Bagi masyarakat, perkembangan kepariwisataan tersebut khususnya di Pantai Delegan memberikan banyak manfaat baik secara ekonomis, sosial dan budaya dengan prasyarat adanya pengeolaan strategis yang optimal pada lini utama tata kelola Pantai Delegan. Kondisi sebaliknya berupa kurangnya persiapan dan pengelolaan akan berdampak pada munculnya permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat.

Gambar 1. Pantai Delegan di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang Dipadati oleh



Wisatawan

Sumber. Dokumentasi Penelitian (2021)

Di Pantai Delegan sendiri, modal social menjadi aspek utama dalam tata kelola dan pengembangan kepariwisataan bahari, khususnya bagi kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan masyarakat pengelola destinasi obyek wisata baik dalam merumuskan capaian apa yang hendak dilaksanakan dan dikembangkan, serta bagaimana strategi teknis pelaksanaannya. Dengan kata lain bahwa orientasi proses kelembagaan lokal menjadi penekanan utama berkaitan dengan kemajuan dari destinasi obyek wisata Pantai Delegan. Kelembagaan tersebut berpotensi dalam memberikan sumbangsiah terciptanya modal sosial. Secara sederhana, hal ini sejalan dengan argument bahwa modal social yang tinggi dari masyarakat di lingkungan destinasi obyek wisata Pantai Delegan menjadi strategi dalam penyelesaian kompleksitas persoalan kepariwisataan dengan lebih mudah serta upaya kolektif dalam mengatasi tantangan kepariwisataan. Pongponrat dan Chantradoan (2012), Liu et al (2020), serta Ancyil dan Le Blanc (2016) mengungkapkan bahwa komponen modal sosial menimbulkan adanya partisipasi/induksi masyarakat lokal dengan rasa kepemilikan yang tinggi (*high sensitivity in sense of belonging*) akan wilayah tinggal, yang mana dalam hal ini adalah destinasi obyek wisata Pantai Delegan di Kecamatan Panceng. Di samping itu, adanya hal tersebut juga memunculkan adanya sikap saling menghormati

satu sama lain dan kemauan bersama untuk pola pembangunan yang lebih baik, sehingga memungkinkan modal social tersebut menciptakan kesepakatan untuk dapat bekerja mengembangkan destinasi obyek wisata Pantai Delegan. Modal sosial muncul sebagai pola atau mekanisme utama yang mendorong dan menarik masyarakat lokal untuk berpartisipasi untuk pengembangan pariwisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengeksplorasi penerapan modal sosial berbasis kawasan pesisir di Kabupaten Gresik, yakni tepatnya pada gambaran kelembagaan masyarakat lokal di destinasi obyek wisata Pantai Delegan dengan elemen-elemen utama berupa jaringan, kepercayaan, serta norma-norma.

METODE

Kajian penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagaimana dinyatakan oleh Denzin dan Lincoln (1994) yang menganggap metodologi kualitatif menjawab pemahaman secara mendalam seputar organisasi/peristiwa tertentu dibanding mendeskripsikan permukaan objek penelitian. Hal ini sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dalam rangka memahami kondisi interaksi social berdasarkan perspektif kelembagaan secara natural. Pendekatan yang digunakan berupa fenomenologi dari Moleong (2017). Pada konteks pendekatan, peneliti mencoba mengungkap pola peristiwa interaksi social yang terjadi selama berlangsungnya tata kelola dan pengembangan di Pantai Delegan oleh masyarakat lokal yang terlibat, dengan kedalaman pemahaman dan inteprestasi masing-masing pada peristiwa yang menentukan tindakan. Interview atau wawancara dilakukan untuk mengumpulkan opini, perasaan, emosi dan hal lain berkaitan dengan individu dalam lembaga pengelola Pantai Delegan, informan berupa tokoh dan stakeholder lokal yang terlibat dalam system kelembagaan tata kelola dan pengembangan Pantai Delegan, serta; pengolahan data dilaksanakan dalam bentuk triangulasi (pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data). Validitas dan reliabilitas data berupa cek dan re-cek aspek-aspek kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas data penelitian hingga pada tahapan penulisan laporan

dan hasil penelitian di destinasi obyek wisata Pantai Delegan dengan mengacu pada elemen-elemen jaringan, kepercayaan, serta norma-norma.

HASIL PENELITIAN

Kelembagaan Lokal Destinasi Wisata Pantai Delegan

Dalam proses pengembangan dan dukungan kepariwisataan di Pantai Delegan, terdapat komponen-komponen berupa tokoh masyarakat, karang taruna, badan usaha milik desa (BUMDes), dan pemerintah desa melalui adanya kelompok sadar wisata (pokdarwis). Pembentukan Pokdarwis memiliki urgensi dalam pengembangan pariwisata dengan adanya pelibatan masyarakat agar lebih terarah dan terakomodir. Pembentukan Pokdarwis berperan mendukung perkembangan pariwisata Pantai Delegan. Selain peran pokdarwis dalam pengembangan pariwisata, juga dilakukan optimasi pada BUMDes dalam tata kelola usaha dan keuntungan/profit di kawasan pariwisata, serta mengakomodir usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) baik di wilayah Pantai Delegan serta di luar wilayah Pantai Delegan namun masih dalam satu wilayah Kabupaten Gresik. Melalui adanya integrasi komponen-komponen dalam masyarakat pengelola dan partisipan pengembang aktivitas kepariwisataan di destinasi obyek wisata Pantai Delegan, maka akan berpotensi mempermudah dalam menyatukan visi misi pengembangan destinasi pariwisata obyek wisata Pantai Delegan dan tidak terkesan berjalan secara individualistik.

Pantai Delegan sendiri masih menjadi salah satu ikon utama di Kabupaten Gresik. Hal ini terbukti dari adanya predikat penghargaan yang diperoleh berupa juara kedua dalam ajang penghargaan “Anugerah Wisata Gresik (AWG) 2021” pada kategori wisata alam. Adanya predikat tersebut tentunya tidak lepas dari adanya konsistensi dan komitmen masyarakat/komunitas dan organisasi yang berperan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata destinasi obyek wisata Pantai Delegan. Di samping itu, hasil kajian lapangan juga menemukan kesesuaian antara konsep metode tata kelola dan pengembangan pariwisata destinasi obyek wisata Pantai Delegan dengan kondisi sosiologis

masyarakat di Desa Delegan Kecamatan Panceng. Pada kondisi pandemic misalnya, masyarakat pengelola berupaya terus mengembangkan dan menghidupkan sector pariwisata alam pantai, namun di sisi lain juga secara teratur mengikuti himbauan prosedur kesehatan yang diberlakukan dan menerapkan prosedur pencegahan persebaran virus Covid-19 (penjagaan kebersihan/sterilisasi kawasan, penggunaan media pencegah persebaran virus, hingga pembatasan jumlah pengunjung). Hal ini yang kemudian menjadikan pariwisata berjalan dengan baik dan tetap hidup meskipun pada kenyataannya berkurang baik dari jumlah atau pendapatan. Namun setidaknya masyarakat lokal pengelola sadar dan bertanggungjawab atas kebaikan bersama.

Modal Sosial Masyarakat Lokal: Jaringan, Norma, dan Kepercayaan

Masyarakat Desa Delegan melakukan partisipasi dalam pengembangan destinasi pariwisata obyek wisata Pantai Delegan dengan tidak adanya keterpaksaan atau dengan kata lain sesuai dengan keinginan dan harapan individu akan adanya kawasan wisata berkelanjutan dengan dampak positif bagi semua pihak. Pada dasarnya masyarakat lokal telah mengetahui adanya imbal balik antara norma dan kepercayaan antar komunitas dan kelompok yang kemudian memaksimalkan potensi wisata Pantai Delegan. Di samping itu, modal sosial pada lingkup masyarakat lokal Desa Delegan pengelola kawasan wisata berbentuk kelembagaan lokal atau kelompok-kelompok organisasi masyarakat yang kemudian termanifestasi dalam sebuah jaringan dalam pencapaian kesamaan tujuan serta didasari oleh adanya kepercayaan serta pemberlakuan norma sosial. Kelembagaan lokal tersebut kemudian berkontribusi dalam pembentukan dan penguatan modal sosial masyarakat sekitar melalui kepaduan tujuan pengelolaan dan pengorganisasian berbentuk pola koordinatif dan kolaboratif. Pengkolaborasi antar komunitas lokal dan kelompok atau paguyuban adalah wujud modal sosial dengan bentuk jaringan yang timbul melalui kepercayaan kelembagaan masyarakat upaya bersama. Kepercayaan kemudian menimbulkan soliditas jaringan bersama dalam aktivitas sharing tata kelola,

pemecahan masalah kepariwisataan, hingga pengembangan potensi wisata Pantai Dalegan.

Aktivitas berupa pertemuan rutin oleh masyarakat lokal pengelola dan partisipan pengembang wisata Pantai Dalegan (termasuk pokdarwis dan BUMDes Desa Delegan) merupakan manifestasi kepercayaan yang merupakan salah satu komponen dalam aspek modal social. Pertemuan dan musyawarah tersebut diupayakan untuk menjaga pola koordinasi, silaturahmi, dan solidaritas sesama individu atau anggota kelompok maupun interaksi dengan kelompok lain. Pertemuan tersebut rutin dilaksanakan dalam jangka waktu sebulan sekali dengan melakukan evaluasi pengelolaan destinasi wisata Pantai Dalegan, membahas kekurangan dan kebutuhan masyarakat usaha lokal, strategi pengembangan dan perbaikan, hingga pola pengaturan keuangan serta investasi kawasan wisata dari kalangan usaha di luar Desa Delegan. Selain itu, pertemuan juga dilakukan secara rutin oleh sektor kalangan usaha dan mitra UMKM yang berdagang dan membuka usaha jasa di wilayah destinasi wisata Pantai Dalegan agar tidak terjadi permasalahan semacam “ketok harga” barang atau jasa. Di samping pertemuan untuk menjaga pola koordinasi dan silaturahmi, pertemuan juga dilaksanakan untuk mengumpulkan serta menyisihkan sebagian hasil usaha sebagai uang kas. Uang kas tersebut diperuntukkan ketika nantinya terdapat masyarakat paguyuban yang mengalami musibah atau peruntukan lain berkaitan dengan kelancaran aktivitas di kawasan destinasi wisata Pantai Delegan.

Komponen norma dalam aspek modal sosial di kawasan destinasi wisata Pantai Delegan beserta aktivitasnya diwujudkan dalam bentuk tata kelola keberlanjutan, keasrian, dan kebersihan kawasan wisata. Norma menjadi kesepakatan bersama yang kemudian dipertanggungjawabkan bersama oleh seluruh elemen di wilayah destinasi wisata Pantai Delegan. Hal tersebut bertujuan memberikan kenyamanan bagi semua pihak yang berkunjung atau beraktivitas di Pantai Dalegan. Salah satu misalnya, paguyuban pedagang makanan di Pantai Dalegan yang menghasilkan sampah sisa pasca menjual makanan, mereka turut bertanggungjawab dalam kebersihan dengan menyediakan tempat sampah, pembuangan akhir,

dan melaksanakan kerja bakti membersihkan sampah sisa makanan. Contoh lain adalah tukang ojek yang menawarkan jasa ojek bagi pengunjung. Norma yang mereka berlakukan berupa adanya titik-titik pengantaran dan penjemputan yang kemudian dapat memberikan rasa aman (tidak mengecewakan pengunjung) dan keramahan dalam memberikan jasa. Kedua aspek penerapan tersebut baik dari pedagang makanan atau usaha jasa tersebut menjadikan adanya dukungan menciptakan image yang bagus dalam kepariwisataan bahari di Pantai Delegan sehingga pengunjung merasa bahwa Pantai Dalegan sangat layak untuk kembali dikunjungi sebagai alternatif destinasi wisata unggulan local di Kabupaten Gresik.

Interaksi Sosial Masyarakat dengan Stakeholder lain

Koordinasi pengembangan kawasan Pantai Delegan membutuhkan kooordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Hal ini mengingat kompleksitas dan permasalahan multidimensi di kawasan wisata. Adanya pembangunan fisik kawasan pantai yang telah dikerjakan dengan baik serta penataan ruang pantai oleh dinas pariwisata sebagai *trigger* tidak semata-mata berakhir dan berhenti sampai disitu saja. Penanganan lain dibutuhkan mengingat adanya fungsi lain dalam pengembangan obyek wisata Pantai Dalegan. Pada aspek peningkatan produk unggulan misalnya, lembaga yang menangani ekonomi dan industri kreatif harus masuk untuk melakukan pendampingan masyarakat local dalam pengembangan produk unggulan. Di sisi lain, dinas komunikasi dan informasi serta humas daerah juga sangat diharapkan dalam upaya kembali melakukan pemasaran dan pengiklanan destinasi wisata Pantai Dalegan untuk semakin menarik minat wisatawan dalam berkunjung ke Pantai Dalegan. Terlebih selama kondisi pandemi, jumlah wisatawan dan pendapatan yang menurun sangat mempengaruhi kondisi masyarakat lokal di Desa Delegan selaku pengelola wisata pantai.

Di samping interaksi peran yang bersifat *intangible*, peran lain berupa suntikan kemudahan perizinan dan akses pemberian modal juga sangat dibutuhkan berkaitan dengan tata kelola pengembangan kawasan wisata serta pelaksanaan usaha UMKM dan jasa pengusaha

lokal. Sebagaimana diketahui bahwa sector pariwisata merupakan sector pertama dan yang paling terdampak atas adanya pandemic. Selain itu juga pariwisata merupakan sector dengan rantai jaringan yang menarik kalangan usaha dengan jumlah tinggikan bervariasi, maka diperlukan adanya dukungan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan revitalisasi membangun kawasan wisata Pantai Dalegan melalui adanya dukungan pemerintah lokal di Kabupaten Gresik melalui pendampingan, pemberdayaan, promosi, kemudahan perizinan, hingga stimulus suntikan akses pemodal untuk kembali memaksimalkan dampak kepariwisataan pada kesejahteraan masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Pola pengorganisasian masyarakat di wilayah penelitian yakni Desa Delegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik telah tergorganisir dengan baik, kuatnya pola pembangunan kepercayaan dan norma yang berlaku antar masyarakat pesisir, hingga pembangunan jejaring yang mampu meningkatkan efisiensi dengan adanya fasilitasi tindakan terkoordinasi dalam dinamika pembangunan kawasan pesisir Pantai Delegan menuju kawasan wisata bahari. Kelompok dominan yang tampil sebagai subjek yakni kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang berada di sekitar kawasan pesisir Pantai Delegan dan badan usaha milik desa (BUMDes). Namun demikian, masih adanya keterbatasan akses (pendanaan, perizinan, pembembangan wisata pesisir, dan sebagainya) dalam pembangunan kawasan menjadi permasalahan utama yang menghambat keberlanjutan pembangunan lokal di masyarakat. Implikasi dari adanya hal tersebut, maka sangat dibutuhkan sentuhan dari pemerintah dan dinas terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya pengembangan lanjutan dan dukungan bagi masyarakat seputar pembangunan pesisir Pantai Delegan di Kabupaten Gresik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancyil, A., & Le Blanc, D. (2016). An educational simulation tool for integrated coastal tourism development in developing countries. *Journal of Sustainable Tourism*, 24(5), 783-798. <https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1091463>
- Liu, An, K., & Jang, S. C. (2020). A model of tourists' civilized behaviors: Toward sustainable coastal tourism in China. *Journal of Destination Marketing & Management*, 16(100437). <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100437>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (cetakan ke-36)*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Pongponrat, K., Naphawan, J., & Chantradoan, N. (2012). Mechanism of social capital in community tourism participatory planning in Samui Island, Thailand. *Tourismos*, 7(1), 339-349.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *Hand Book of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: Sage Publication Inc.